

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

1. Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan Nasional.

Adapun Capaian Kinerja Makro Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Perubahan
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Manusia	80,7	81,4	0,89%
2.	Angka Kemiskinan	5,14	4,46	-13,23%
3.	Angka Pengangguran	6,09	4,90	-19,54%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	3,61	4,68	29,64%
5.	Pendapatan Per Kapita	13331	13633	2,27%
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,286	0,317	10,83%

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2023 & BPS Sumatera Barat



2. Ringkasan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Ringkasan capaian kinerja setiap urusan pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022

NO. IKK	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
1.a.1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 4207. Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 4769	88,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 16833. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 15163	111,01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.3	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 8545. Jumlah anak usia 13-15	112,88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	



NO. IKK	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 7570			
1.a.4	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 556. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 4	13900,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.b.1	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 742. Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 134412	0,55	Dinas Kesehatan	
1.b.2	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 5. Jumlah RS di kabupaten/kota = 6	83,33	Dinas Kesehatan	
1.b.3	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 2547. Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota = 2737	93,06	Dinas Kesehatan	
1.b.4	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 2273. Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 2612	87,02	Dinas Kesehatan	
1.b.5	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 2225. Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 2488	89,43	Dinas Kesehatan	



NO. IKK	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
1.b.6	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 9267. Jumlah balita di kabupaten/kota = 9542	97,12	Dinas Kesehatan	
1.b.7	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 5491. Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 5935	92,52	Dinas Kesehatan	
1.b.8	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 49977. Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 92503	54,03	Dinas Kesehatan	
1.b.9	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 12677. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = 13134	96,52	Dinas Kesehatan	
1.b.10	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 8383. Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 22599	37,09	Dinas Kesehatan	
1.b.11	Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 949. Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 1146	82,81	Dinas Kesehatan	



NO. IKK	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
1.b.12	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 245. Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = 1276	19,20	Dinas Kesehatan	
1.b.13	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 2503. Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = 4940	50,67	Dinas Kesehatan	
1.b.14	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 4405. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 5012	87,89	Dinas Kesehatan	
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 1	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Surat Pernyataan Kepala DPUPR No900.1.12/131/DPUPR-P&K/I-2023 tanggal 31 Januari 2023 yang menyatakan tidak ada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Kota Bukittinggi
1.c.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = 1. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Surat Pernyataan Kepala DPUPR No900.1.12/130/DPUPR-P&K/I-2023 tanggal 31 Januari 2023 yang menyatakan tidak ada kawasan pantai di Kota Bukittinggi



NO. IKK	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 1			
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 226.94. luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = 214.48	105,81	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. = 24594. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. = 27743	88,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 3575. Jumlah rumah di Kabupaten A = 4066	87,92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	



NO. IKK	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
	Penataan Ruang		peruntukannya = 167. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku = 167			
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 165.22. Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota = 180.169	91,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 0. Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota = 0	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 25. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 25	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.d.1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 1. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 1	100,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.d.2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga	100,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	



NO. IKK	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 1. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 1			
1.d.3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 1.43. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 4.25	33,65	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.d.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni = 1507. Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 24630	6,12	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 0. Jumlah unit rumah kab/kota = 24630	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU setelah satuan perumahan menyerahkan PSU ke Pemerintah Daerah adalah Nihil sebagaimana Surat keterangan Kepala DISPERKIM No.100/115/DPKP-Bkt/2023 tanggal Maret 2022
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani = 344. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 350	98,29	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.e.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksiyang ditegakkan = 1. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 1	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja	



NO. IKK	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
1.e.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 131817. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 131817	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 107529. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 134412	80,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 1028. Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 1028	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat = 50. Jumlah kejadian	100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	



NO. IKK	URUSAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			kebakaran di kabupaten/kota = 50			
1.e.7	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	7,60	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1.f.1	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 901. Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 901	100,00	Dinas Sosial	
1.f.2	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 656. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 656	100,00	Dinas Sosial	



3. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor 90/S-HP/XVIII.PDG/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 menyatakan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**

4. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Realisasi Penerimaan menurut jenis penerimaan Kota Bukittinggi Tahun 2022 diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3
REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN TAHUN 2022

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	714.157.721.650,00	698.402.386.323,22	97.79
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	136.257.791.456,00	130.796.925.183,85	95.99
Pajak Daerah	50.269.852.262,00	49.570.750.398,00	98.61
Pajak Hotel	16.132.300.000,00	16.203.159.513,00	100.44
Pajak Hotel Pajak Hotel	15.979.000.000,00	16.148.312.295,00	101.06
Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	150.000.000,00	51.294.718,00	34.20
Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	3.300.000,00	3.552.500,00	107.65
Pajak Restoran	8.532.186.156,00	6.907.203.972,00	80.95
Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.532.186.156,00	6.428.174.324,00	85.34
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	400.000.000,00	223.719.530,00	55.93
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	600.000.000,00	255.310.118,00	42.55
Pajak Hiburan	1.088.022.310,00	1.004.246.805,00	92.30
Pajak Tontonan Film	14.500.000,00	4.188.750,00	28.89
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	10.000.000,00	563.500,00	5.64
Pajak Permainan Biliar dan Bowling	20.000.000,00	2.470.500,00	12.35
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.028.512.310,00	990.419.677,00	96.30
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	15.010.000,00	6.604.378,00	44.00
Pajak Reklame	860.800.000,00	967.282.188,00	112.37
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	800.000.000,00	842.561.688,00	105.32
Pajak Reklame Kain	30.500.000,00	112.420.500,00	368.59
Pajak Reklame Berjalan	30.300.000,00	12.300.000,00	40.59
Pajak Penerangan Jalan	6.074.338.220,00	6.268.267.602,00	103.19
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	6.074.338.220,00	6.268.267.602,00	103.19
Pajak Parkir	400.000.000,00	322.475.568,00	80.62

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
1	2	3	4
Pajak Parkir	400.000.000,00	322.475.568,00	80.62
Pajak Air Tanah	70.000.000,00	76.075.811,00	108.68
Pajak Air Tanah	70.000.000,00	76.075.811,00	108.68
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.090.100.000,00	3.925.523.043,00	95.98
PBBP2	4.090.100.000,00	3.925.523.043,00	95.98
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.022.105.576,00	13.896.515.896,00	106.71
BPHTB-Pemindahan Hak	13.022.105.576,00	13.480.085.896,00	103.52
BPHTB-Pemberian Hak Baru	0	416.430.000,00	0.00
Retribusi Daerah	48.684.034.000,00	46.662.398.969,00	95.85
Retribusi Jasa Umum	7.135.364.000,00	7.545.948.790,00	105.75
Retribusi Pelayanan Kesehatan	550.000.000,00	709.272.000,00	128.96
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.550.864.000,00	1.531.797.690,00	98.77
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5.000.000,00	2.275.000,00	45.50
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000,00	1.305.794.000,00	87.05
Retribusi Pelayanan Pasar	1.272.500.000,00	1.316.078.600,00	103.42
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	2.000.000.000,00	2.212.882.000,00	110.64
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	7.000.000,00	8.169.500,00	116.71
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	250.000.000,00	459.680.000,00	183.87
Retribusi Jasa Usaha	41.334.500.000,00	38.912.836.534,00	94.14
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	232.000.000,00	177.292.800,00	76.42
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	9.800.000.000,00	8.941.077.094,00	91.24
Retribusi Terminal	182.500.000,00	190.204.000,00	104.22
Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.000.000.000,00	1.542.814.000,00	77.14
Retribusi Rumah Potong Hewan	240.000.000,00	241.040.000,00	100.43
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	28.800.000.000,00	27.746.558.055,00	96.34
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	80.000.000,00	73.850.585,00	92.31
Retribusi Perizinan Tertentu	214.170.000,00	203.613.645,00	95.07
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	180.000.000,00	174.393.645,00	96.89
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	34.170.000,00	29.220.000,00	85.51
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.505.000.000,00	6.641.291.925,00	88.49
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	7.505.000.000,00	6.641.291.925,00	88.49
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.505.000.000,00	6.641.291.925,00	88.49
Lain-lain PAD yang Sah	29.798.905.194,00	27.922.483.891,85	93.70
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	214.186.000,00	35.900.000,00	16.76
Hasil Penjualan Aset Lainnya	214.186.000,00	35.900.000,00	16.76
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.067.000.000,00	632.792.049,00	59.31
Hasil Sewa BMD	345.000.000,00	542.229.200,00	157.17
Hasil dari Bangun Guna Serah	722.000.000,00	90.562.849,00	12.54



URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
1	2	3	4
Jasa Giro	4.650.000.000,00	2.639.172.489,00	56.76
Jasa Giro pada Kas Daerah	4.650.000.000,00	2.452.034.840,00	52.73
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0	133.819.493,00	0.00
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0	45.444.737,00	0.00
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0	7.873.419,00	0.00
Pendapatan Bunga	5.750.000.000,00	4.244.628.513,40	73.82
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.750.000.000,00	4.244.628.513,40	73.82
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0	6.000.000,00	0.00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0	6.000.000,00	0.00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0	142.636.531,00	0.00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0	142.636.531,00	0.00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	191.880.143,75	0.00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	191.880.143,75	0.00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	125.000.000,00	334.802.457,00	267.84
Pendapatan Denda Pajak Hotel	25.000.000,00	23.734.581,00	94.94
Pendapatan Denda Pajak Restoran	40.000.000,00	11.849.168,00	29.62
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0	1.021.950,00	0.00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	0	1.382.400,00	0.00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	0	29.096,00	0.00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0	5.981,00	0.00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	60.000.000,00	296.779.281,00	494.63
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0	180.043.745,00	0.00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0	18.067.272,00	0.00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0	158.724.973,00	0.00
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0	3.251.500,00	0.00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0	671.001.216,00	0.00
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0	671.001.216,00	0.00
Pendapatan dari Pengembalian	2.554.417.426,00	2.663.715.363,70	104.28
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.554.417.426,00	72.188.448,00	2.83
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0	1.203.449.603,00	0.00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	0	1.388.077.312,70	0.00
Pendapatan BLUD	15.438.301.768,00	16.155.511.384,00	104.65
Pendapatan BLUD	15.438.301.768,00	16.155.511.384,00	104.65
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0	0	0.00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0	0	0.00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0	24.400.000,00	0.00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0	24.400.000,00	0.00
PENDAPATAN TRANSFER	577.899.930.194,00	567.387.873.682,00	98.18



URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
1	2	3	4
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	543.423.791.657,00	532.574.902.562,00	98.00
Dana Perimbangan	543.423.791.657,00	532.574.902.562,00	98.00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.894.532.000,00	18.945.474.525,00	119.19
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	415.488.236.540,00	419.027.434.440,00	100.85
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	49.076.996.961,00	38.100.592.208,00	77.63
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	62.964.026.156,00	56.501.401.389,00	89.74
Dana Insentif Daerah (DID)	0	0	0.00
DID	0	0	0.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.476.138.537,00	34.812.971.120,00	100.98
Pendapatan Bagi Hasil	34.076.138.537,00	34.412.971.120,00	100.99
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	34.076.138.537,00	34.412.971.120,00	100.99
Bantuan Keuangan	400.000.000,00	400.000.000,00	100.00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	400.000.000,00	400.000.000,00	100.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	217.587.457,37	0.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	217.587.457,37	0.00
Lain-lain Pendapatan	0	217.587.457,37	0.00
Pendapatan Hibah Dana BOS	0	5.667.500,00	0.00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0	211.919.957,37	0.00

Sumber : Badan Keuangan

Realisasi Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4
REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2022

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
1	2	3	4
BELANJA DAERAH	837.145.281.505,00	744.066.220.349,66	88.88
BELANJA OPERASI	675.422.845.486,00	611.269.152.755,10	90.50
Belanja Pegawai	325.444.707.669,00	301.391.117.365,66	92.61
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	171.487.316.916,00	165.386.255.784,00	96.44
Belanja Gaji Pokok ASN	127.611.797.186,00	123.488.603.270,00	96.77
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	12.360.034.035,00	11.889.147.101,00	96.19
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.699.196.036,00	5.473.047.050,00	96.03
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.849.110.283,00	5.528.378.350,00	94.52
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.614.322.564,00	2.474.240.000,00	94.64
Belanja Tunjangan Beras ASN	7.654.653.392,00	7.327.093.090,00	95.72
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	252.863.834,00	233.682.004,00	92.41
Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.920.802,00	1.697.030,00	88.35



URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
1	2	3	4
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	8.362.751.866,00	7.956.110.240,00	95.14
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	271.528.927,00	253.495.796,00	93.36
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	809.137.991,00	760.761.853,00	94.02
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	88.722.711.128,00	82.495.178.895,66	92.98
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	40.628.341.890,00	37.752.146.280,66	92.92
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0	0	0.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0	0	0.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	48.094.369.238,00	44.743.032.615,00	93.03
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	45.648.577.534,00	39.573.406.240,00	86.69
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.842.024.603,00	1.345.843.879,00	73.06
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.061.279.338,00	767.432.934,00	72.31
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	32.670.310.120,00	30.319.047.800,00	92.80
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	400.750.000,00	334.000.000,00	83.34
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	172.999.644,00	64.300.601,00	37.17
Belanja Honorarium	8.511.513.829,00	5.771.581.026,00	67.81
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	989.700.000,00	971.200.000,00	98.13
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.496.015.094,00	9.849.462.007,00	93.84
Belanja Uang Representasi DPRD	580.000.000,00	547.365.000,00	94.37
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	50.000.000,00	45.870.300,00	91.74
Belanja Tunjangan Beras DPRD	60.000.000,00	56.487.600,00	94.15
Belanja Uang Paket DPRD	60.000.000,00	48.132.000,00	80.22
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	840.000.000,00	793.679.250,00	94.49
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	100.000.000,00	80.570.700,00	80.57
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.375.000,00	0	0.00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	100.00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	672.340.000,00	466.200.000,00	69.34
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	700.094,00	417.421,00	59.62
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.877.600.000,00	2.698.461.378,00	93.77
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.300.000.000,00	3.222.278.358,00	97.64
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	50.000.000,00	0	0.00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.621.474.179,00	1.216.458.905,00	75.02
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	54.600.000,00	97.56
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.000.000,00	6.048.000,00	75.60
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	97.56
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.200.000,00	4.345.200,00	52.99
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	600.000,00	459.474,00	76.58
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.624,00	960	36.59
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.588.080,00	5.448.960,00	82.71



URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
1	2	3	4
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316,00	112.320,00	83.62
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948,00	336.960,00	83.62
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	669.618.528,00	613.285.998,00	91.59
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	771.225.683,00	433.541.033,00	56.21
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	714.030.000,00	527.451.234,00	73.87
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	116.030.000,00	100.800.000,00	86.87
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	598.000.000,00	426.651.234,00	71.35
Belanja Pegawai BOS	0	0	0.00
Belanja Pegawai BOS	0	0	0.00
Belanja Pegawai BLUD	6.754.582.818,00	2.342.904.300,00	34.69
Belanja Pegawai BLUD	6.754.582.818,00	2.342.904.300,00	34.69
Belanja Barang dan Jasa	301.912.139.291,00	264.544.058.412,28	87.62
Belanja Barang	52.636.885.429,00	45.252.903.639,74	85.97
Belanja Barang Pakai Habis	52.615.877.429,00	45.241.953.200,74	85.99
Belanja Barang Tak Habis Pakai	21.008.000,00	10.950.439,00	52.13
Belanja Jasa	157.512.299.151,00	141.940.212.404,68	90.11
Belanja Jasa Kantor	134.339.998.999,00	122.177.702.989,99	90.95
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.706.595.428,00	7.680.266.210,00	88.21
Belanja Sewa Tanah	2.331.824.200,00	2.270.461.483,00	97.37
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.849.732.844,00	2.930.859.944,00	76.13
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.198.175.000,00	1.950.919.870,00	88.75
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	35.500.000,00	35.350.000,00	99.58
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.495.600.000,00	773.978.551,40	51.75
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.259.223.846,00	1.977.848.616,25	87.55
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	141.000.000,00	141.000.000,00	100.00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.599.760.000,00	1.529.618.140,04	95.62
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	224.550.000,00	197.023.268,00	87.74
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	330.338.834,00	275.183.332,00	83.30
Belanja Pemeliharaan	28.712.176.742,00	22.663.628.650,86	78.93
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.991.696.204,00	14.479.596.644,26	80.48
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.530.066.199,00	2.616.255.512,60	74.11
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.794.414.339,00	3.217.713.404,00	67.11
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.396.000.000,00	2.350.063.090,00	98.08
Belana Perjalanan Dinas	44.438.835.988,00	38.444.404.647,00	86.51
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.378.835.988,00	38.384.404.647,00	86.49
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	60.000.000,00	60.000.000,00	100.00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.080.650.000,00	2.751.096.770,00	89.30
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.900.150.000,00	2.670.317.720,00	92.08



URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
1	2	3	4
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	180.500.000,00	80.779.050,00	44.75
Belanja Barang dan Jasa BOS	11.423.434.704,00	11.098.294.672,00	97.15
Belanja Barang dan Jasa BOS	11.423.434.704,00	11.098.294.672,00	97.15
Belanja Barang dan Jasa BLUD	4.107.857.277,00	2.393.517.628,00	58.27
Belanja Barang dan Jasa BLUD	4.107.857.277,00	2.393.517.628,00	58.27
Belanja Subsidi	3.385.520.000,00	2.910.989.266,00	85.98
Belanja Subsidi kepada BUMN	470.520.000,00	0	0.00
Belanja Subsidi kepada BUMN	470.520.000,00	0	0.00
Belanja Subsidi kepada BUMD	2.575.000.000,00	2.574.989.266,00	100.00
Belanja Subsidi kepada BUMD	2.575.000.000,00	2.574.989.266,00	100.00
Belanja Subsidi kepada Koperasi	340.000.000,00	336.000.000,00	98.82
Belanja Subsidi kepada Koperasi	340.000.000,00	336.000.000,00	98.82
Belanja Hibah	42.425.478.526,00	40.192.987.711,16	94.74
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0	0	0.00
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0	0	0.00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	34.987.231.000,00	32.862.652.041,16	93.93
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.632.581.000,00	11.507.400.481,73	98.92
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	22.323.043.000,00	20.403.961.659,43	91.40
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.031.607.000,00	951.289.900,00	92.21
Belanja Hibah Dana BOS	6.702.600.000,00	6.624.278.680,00	98.83
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	6.702.600.000,00	6.624.278.680,00	98.83
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	735.647.526,00	706.056.990,00	95.98
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	735.647.526,00	706.056.990,00	95.98
Belanja Bantuan Sosial	2.255.000.000,00	2.230.000.000,00	98.89
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.255.000.000,00	2.230.000.000,00	98.89
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.255.000.000,00	2.230.000.000,00	98.89
BELANJA MODAL	147.955.769.352,00	124.005.630.244,56	83.81
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Tanah Persil	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.312.518.236,00	48.131.479.720,00	79.80
Belanja Modal Alat Besar	1.954.975.611,00	1.858.680.101,00	95.07
Belanja Modal Alat Besar Darat	983.404.611,00	983.404.611,00	100.00
Belanja Modal Alat Bantu	971.571.000,00	875.275.490,00	90.09
Belanja Modal Alat Angkutan	9.964.991.800,00	7.149.290.925,00	71.74
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	9.852.691.800,00	7.045.449.925,00	71.51
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	112.300.000,00	103.841.000,00	92.47



URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
1	2	3	4
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	97.715.000,00	76.930.299,00	78.73
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	51.100.000,00	39.312.580,00	76.93
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	9.299.000,00	6.671.579,00	71.75
Belanja Modal Alat Ukur	37.316.000,00	30.946.140,00	82.93
Belanja Modal Alat Pertanian	128.935.000,00	126.695.904,00	98.26
Belanja Modal Alat Pengolahan	128.935.000,00	126.695.904,00	98.26
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.093.891.526,00	9.013.943.677,86	89.30
Belanja Modal Alat Kantor	2.643.629.000,00	2.515.897.136,20	95.17
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.890.262.926,00	6.020.537.671,66	87.38
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	559.999.600,00	477.508.870,00	85.27
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	648.299.875,00	605.716.790,00	93.43
Belanja Modal Alat Studio	514.449.875,00	493.154.040,00	95.86
Belanja Modal Alat Komunikasi	133.850.000,00	112.562.750,00	84.10
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	15.000.364.800,00	9.665.490.666,00	64.44
Belanja Modal Alat Kedokteran	14.237.500.000,00	9.108.889.434,00	63.98
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	762.864.800,00	556.601.232,00	72.96
Belanja Modal Alat Laboratorium	3.603.762.725,00	3.401.932.270,00	94.40
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.487.426.250,00	3.301.810.820,00	94.68
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	64.236.475,00	61.804.475,00	96.21
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	8.100.000,00	8.100.000,00	100.00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	44.000.000,00	30.216.975,00	68.67
Belanja Modal Komputer	10.682.361.430,00	10.163.280.266,00	95.14
Belanja Modal Komputer Unit	9.430.316.750,00	9.011.764.690,00	95.56
Belanja Modal Peralatan Komputer	1.252.044.680,00	1.151.515.576,00	91.97
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	15.000.000,00	15.000.000,00	100.00
Belanja Modal Sumur	15.000.000,00	15.000.000,00	100.00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	71.600.000,00	71.530.000,00	99.90
Belanja Modal Alat Pelindung	0	0	0.00
Belanja Modal Alat SAR	71.600.000,00	71.530.000,00	99.90
Belanja Modal Alat Peraga	2.145.000.000,00	2.136.609.600,00	99.61
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	2.145.000.000,00	2.136.609.600,00	99.61
Belanja Modal Rambu-Rambu	28.256.000,00	28.148.520,00	99.62
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	28.256.000,00	28.148.520,00	99.62
Belanja Modal Peralatan Olahraga	78.300.000,00	32.562.500,00	41.59
Belanja Modal Peralatan Olahraga	78.300.000,00	32.562.500,00	41.59
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bos	1.923.202.796,00	1.894.384.256,00	98.50
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bos	1.923.202.796,00	1.894.384.256,00	98.50
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.875.861.673,00	1.891.283.945,14	48.80
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.875.861.673,00	1.891.283.945,14	48.80



URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
1	2	3	4
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.140.307.759,00	25.739.508.574,06	77.67
Belanja Modal Bangunan Gedung	31.676.307.759,00	25.147.155.650,71	79.39
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	31.066.307.759,00	24.540.910.473,71	79.00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	610.000.000,00	606.245.177,00	99.38
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	764.000.000,00	592.352.923,35	77.53
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	764.000.000,00	592.352.923,35	77.53
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	700.000.000,00	0	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	700.000.000,00	0	0.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.760.228.857,00	45.500.951.384,50	91.44
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	25.754.307.035,00	22.285.563.560,54	86.53
Belanja Modal Jalan	24.789.858.035,00	21.658.344.001,95	87.37
Belanja Modal Jembatan	964.449.000,00	627.219.558,59	65.03
Belanja Modal Bangunan Air	20.829.173.680,00	20.389.937.761,95	97.89
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.910.759.000,00	2.845.067.497,26	97.74
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	398.648.000,00	293.789.244,27	73.70
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	17.519.766.680,00	17.251.081.020,42	98.47
Belanja Modal Instalasi	2.681.748.142,00	2.524.229.606,55	94.13
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	88.000.000,00	86.775.000,00	98.61
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.914.955.057,00	1.758.661.566,55	91.84
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	678.793.085,00	678.793.040,00	100.00
Belanja Modal Jaringan	495.000.000,00	301.220.455,46	60.85
Belanja Modal Jaringan Air Minum	0	0	0.00
Belanja Modal Jaringan Listrik	495.000.000,00	301.220.455,46	60.85
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.742.714.500,00	4.633.690.566,00	97.70
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	3.184.850.000,00	3.173.837.686,00	99.65
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	58.700.000,00	57.666.240,00	98.24
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	3.126.150.000,00	3.116.171.446,00	99.68
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	100.00
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	100.00
Belanja Modal Hewan	50.000.000,00	43.225.000,00	86.45
Belanja Modal Hewan Piaraan	50.000.000,00	43.225.000,00	86.45
Belanja Modal Tanaman	70.000.000,00	0	0.00
Belanja Modal Tanaman	70.000.000,00	0	0.00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	149.502.000,00	142.249.380,00	95.15
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	149.502.000,00	142.249.380,00	95.15
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.283.362.500,00	1.269.378.500,00	98.91
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.283.362.500,00	1.269.378.500,00	98.91
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	271.437.350,00	5.43
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	271.437.350,00	5.43



URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
1	2	3	4
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	271.437.350,00	5.43
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	271.437.350,00	5.43
BELANJA TRANSFER	8.766.666.667,00	8.520.000.000,00	97.19
Belanja Bantuan Keuangan	8.766.666.667,00	8.520.000.000,00	97.19
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	8.766.666.667,00	8.520.000.000,00	97.19
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	8.766.666.667,00	8.520.000.000,00	97.19
SURPLUS / DEFISIT	-122.987.559.855,00	-45.663.834.026,44	37.13
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	132.987.559.855,00	132.987.559.855,90	100.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	132.987.559.855,00	132.987.559.855,90	100.00
Penghematan Belanja	132.987.559.855,00	132.987.559.855,90	100.00
Penghematan Belanja-Belanja Operasi	66.244.246.089,00	66.244.246.089,00	100.00
Penghematan Belanja-Belanja Modal	66.743.313.766,00	66.743.313.766,90	100.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100.00
Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100.00
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100.00
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100.00
PEMBIAYAAN NETTO	122.987.559.855,00	122.987.559.855,90	100.00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0	77.323.725.829,46	0.00

5. Inovasi Daerah

Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan dimaksud, sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan Pelayanan Publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing Daerah.

inovasi daerah Kota Bukittinggi pada Tahun 2022 diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5
DAFTAR INOVASI DAERAH SKPD LINGKUP PEMKO BUKITTINGGI

NO.	PERANGKAT DAERAH	INOVASI DAERAH
1.	2.	3.
1.	Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah (Simbangda) b. Penataan Pelayanan Administrasi Persuratan berbasis Elektronik
	a. Bagian Administrasi Pembangunan	a. Master Data Pembangunan Indonesia
	b. Bagian Pemerintahan	a. Aplikasi Kerjasama pemerintah Kota Bukittinggi
	c. Bagian Organisasi	a. Aplikasi TATANDI (Tata Naskah Dinas)
	d. Bagian Perekonomian dan SDA	a. INTERMILAN (Inflasi terjaga Melalui Koordinasi Berkelanjutan)
2.	Badan-Badan	
	a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> a. Aplikasi e-PATI (Optimalisasi Pengusulan Pensiun PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi) b. Aplikasi Klik ASN Dalam Rangka Layanan Kepegawaian ASN Pemerintah Kota Bukittinggi c. Sistem Elektronik Cuti Terintegrasi (Secuter) d. BKPSDM Go Dit (Bank Data Digital BKPSDM Kota Bukittinggi)
	b. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> a. BIC (Bukittinggi Innovation Centre) b. Bukittinggi Great Spacial Planning c. Mapping Stunting (Pemetaan Percepatan Penurunan Stunting Kota Bukittinggi) d. Forekraf (Forum Ekonomi Kreatif) e. Kickers (Kartu Kendali Terintegrasi) f. Forlitbang (Forum Kelitbang Bukittinggi)
	c. Badan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. SIPADEH (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah) b. Pojok Pajak c. Layanan Konsultasi Penganggaran d. Klinik Pengelolaan BMD
	d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. The Great Bukittinggi of Resilience b. PUDINK
3.	Dinas-Dinas	
	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan Sistem Informasi Paperless Office di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi b. Implementasi Program Satuan Pendidikan non Formal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Berbasis Komunitas Masyarakat c. Onde-Onde Sipuluik Itam



NO.	PERANGKAT DAERAH	INOVASI DAERAH
1.	2.	3.
		<ul style="list-style-type: none"> d. Bingkisan si Google di Masa Pandemi di Taman kanak-Kanak e. SiManja (Sistem Informasi Manajemen Penilaian Kerja) f. Pangkalan Data dan Informasi Sarana dan Prasarana Pendidikan (PADATI SAPADI)
	b. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga	<ul style="list-style-type: none"> a. DIMUKO (Dapur Inovasi Menu Unggulan Kuliner Objek) b. TATA RAMA (Taman Tahfidz Ngarai Maaram) c. Geowisata Ngarai Sianok sebagai Laboratorium Alam Terpadu di Kota Bukittinggi d. Pariwisata Sehat Bersama Aseb e. Pemanfaatan Titik Nol Kilometer Bukittinggi di Jam Gadang sebagai Daya Tarik Wisata Baru f. DPK (Dapur Pak Kabid) g. Si Prabu (Sistem Informasi Pariwisata Kota Bukittinggi) h. Eco Office 5P1k i. Segar hebat j. Jam Gadang Check Point
	c. Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. E-SEHATI (e-Sistem Informasi Kesehatan Satu Pintu) b. SIAP PAK (Sistem Informasi Penilaian Angka Kredit) c. GEMA CHETTING (Gerakan Bersama Cegah Stunting) d. APEDAPEK (Aplikasi Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan) e. E-BUGAR ASN f. GEBU EMAS (Gerakan Budaya Masyarakat Sehat) g. SIPETASAN (Sistem Informasi Pengelolaan Tenaga dan Sarana)
	d. Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Respon Cepat Penanganan Orang Terlantar di Kota Bukittinggi b. Si Tuan c. Baling Bambu (Bantu Sekeliling Bantu Semampumu) d. Sosial Ranger
	e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> a. KETUPAT PAKU (Perekaman KTP di Tempat Sampai ke Pintu) b. BERKAT YAKIN (Pemberkatan Lahirkan Layanan Akta Perkawinan) c. TEMAN DEKAT (Setelah Menikah Delapan Dokumen Didapat) d. D5/DELIMA (Layanan Daring Dokumen Dapat Dicitak Dirumah) e. Lacak Pasbana f. Lentera Mendung Baru Cerah
	f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a. PESAN KOMEN (Pelayanan, Pengawasan dan Perlindungan Konsumen)



NO.	PERANGKAT DAERAH	INOVASI DAERAH
1.	2.	3.
		<ul style="list-style-type: none"> b. e-PUTRI SAYA (Elektronik Pungutan Retribusi pasar rakyat) c. Klinik Koperasi d. Digitalisasi UMKM e. Sistem E-Parkir f. Sistem e-Retribusi
	g. Dinas Pertanian dan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan Limbah Spuit untuk Pembuatan Pelontar Obat Kucing di UPTD Puskesmas Kota Bukittinggi b. Senapan Bius Hewan Berbahan PVC (UPTD Puskesmas) c. Budiman (Budidaya Ikan dan Tanaman) UPTD BBIH d. Pelontar Obat Ekonomis (UPTD Puskesmas) e. Tarunnak (Tangga Turunan Ternak) UPTD RPH f. Pengembangan Agrowisata di Ladang Luntuah, Tigo Baleh g. Publikasi Analisis Data Bidang Ketahanan Pangan h. Klinik Tanaman Hebat (Kita Babat) i. Dewi Lalu (Desa Wisata Ladang Luntuah) j. Disuper Yansi Lasip (Digitalisasi Surat untuk Percepatan Pelayanan dan Efisiensi Pengelolaan Arsip)
	h. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Si MOTA b. SIKOMO c. e-Peka d. e-nancape'ma e. Si Sutan f. Lapakita (Lacak Produk Unggulan Kota Bukittinggi) g. Nib's Day (Talkshow/Sosialisasi Layanan NIB Bagi Usaha Mikro Kecil) h. Papilo (Pelayanan Perizinan di Lokasi) i. SITAPETINAKER (Sinkronisasi Data Peserta Pelatihan Kerja) j. Rumah Gadang IKM
	i. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Penyimpanan Arsip Digital Pertanahan (Spasial Tanah) b. Aplikasi Geobit (Geografis Bukittinggi) c. ATAR BERSPASIAL (Digitalisasi Arsip Pertanahan) d. Lacak (Layanan Cepat) e. D'Jari (Data base Jalan dan Irigasi)
	j. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. SIRUBI (Sistem Informasi Rumah Kota Bukittinggi) b. Sistem Informasi PSU Kota Bukittinggi c. Klinik Rumah Layak Huni (RLH Corner) d. Maruya (Masyarakat Rusun Berdaya) e. Sistem Informasi Perhitungan Pengurangan Kumuh Berbasis Partisipatif dan Spasial (Si Tungku Panas)



NO.	PERANGKAT DAERAH	INOVASI DAERAH
1.	2.	3.
		f. Sistem Informasi kenaikan Gaji Berkala
	k. Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Aplikasi PPID Kota Bukittinggi b. Sistem Bukittinggi Hebat (SBH) c. Baca Berita Bukittinggi Hebat (Babe Hebat) d. Sistem Administrasi Dinas Kominfo
	l. Dinas Perhubungan	a. Optimalisasi Pengarsipan Surat Perintah Tugas (SPT) melalui Digitalisasi pada Seksi Tata Teknik Perparkiran dan Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi b. Optimalisasi Informasi bagi Masyarakat melalui Pembuatan Website di Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi c. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara online di Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi d. Kuperis (Kartu Disiplin PNS) e. Baret kape (Pembayaran Retribusi Kartu Pengawasan) f. Terasi (Tentang Transportasi) g. Si taslan (Sistem Informasi Fasilitas Perlengkapan Jalan)
	m. Dinas Lingkungan Hidup	a. SIPANGADU (Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan) b. POLLING (Podcast Lingkungan Hidup) c. SIDO PS (Sistem Delivery Order Pengelolaan Sampah) d. Si KOMO (Sistem Pengelolaan Kompos dan Maggot) e. Geram Lingkungan (Gerakan Masyarakat Melek Lingkungan) f. Go Prada (Pakai Kreasi Daur Ulang) g. Penyediaan Centre Point (Depo) Limbah B3 Kota Bukittinggi
	n. Dinas Kebakaran	a. BU SADIG (Aplikasi Buku Saku Digital Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran untuk Relawan Kebakaran dan Masyarakat) b. Layanan Bantuan Penyelamatan untuk Masyarakat melalui Aplikasi "Halo Pemadam e-113" c. Wisata Edukasi Pemadam Kebakaran d. Whatsapp Siaga pemadam (WA si Adam)
	o. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. ETALASE YAN PAPA (Akun Media Sosial layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bukittinggi) b. DAI BANGGA (Data Indeks Pembangunan Keluarga Kota Bukittinggi) c. SILVER PETAKU (Sistem Layanan Verifikasi dan Pertanggungjawaban Keuangan) d. GEMILANG (Genre Memutus Stunting) e. SULTAN GALON (Konsultasi Ketahanan keluarga Online) f. ITS BAT nikah Terpadu (ISBANTER)



NO.	PERANGKAT DAERAH	INOVASI DAERAH
1.	2.	3.
		<ul style="list-style-type: none"> g. Sekolah Keluarga h. ASI BANGSTIK (Advokasi Sosialisasi Intervensi Pembangunan Keluarga melalui Stiker) i. Duta Apak Paja
	p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> a. KOMUNITAS BILAH (Bukittinggi Literasi Anak Hebat) b. PENA MAS DARSINI (Penyelamatan Arsip Masuk Sekolah Membangun Sadar Arsip dari Dini) c. Sobbat si May d. AUTUM KOBA (Arsip Autentik dan Terpercaya Untuk Memori Kolektif Bangsa)
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none"> a. CENGAP SATLINMAS b. PANSOS PANDAK GAKKUM TRANTIBUM c. MASIH ANJAL (Rumah Singgah Anak Jalanan) d. SILANGDA (Sistem Informasi Pelanggaran Peraturan Daerah) e. SIPASAN (Sistem Pelaporan Satlinmas) f. Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4) Bukittinggi
5.	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan e-Audit dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Audit dan Tindak Lanjut Temuan pada Inspektorat Kota Bukittinggi b. Pembangunan e-Consulting dalam rangka Optimalisasi Peran Inspektorat Kota Bukittinggi c. Pengawasan Optimalisasi PAD
6.	Sekretariat DPRD	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Percepatan Pelayanan Kunjungan Kerja ke DPRD Kota Bukittinggi b. Penataan Dokumen Badan Anggaran DPRD di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan (LANCAR) Layanan Cepat Administrasi Rapi c.
7.	Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> a. SIP Jam Gadaang (Sistem Informasi Penelitian) b. Bang Ron
8.	Kecamatan	
	a. Aur Birugo Tigo Baleh	<ul style="list-style-type: none"> a. ABTB Berkah b. Aplikasi Laporan c. Dewan Penyantun Masyarakat Kecamatan d. ABTB Berbudaya e. ABTB Laris f. ABTB Smart g. ABTB Menanam h. ABTB Mengaji i. ABTB Sehat dan ABTB Bugar j. Klinik Keluarga Sasaran Berbasis Mesjid k. ABTB Media Centre l. Sistem Informasi Administrasi Pembangunan Kelurahan m. Delivery ABTB
	b. Guguk Panjang	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekolah Terbuka Bagi Kafilah



NO.	PERANGKAT DAERAH	INOVASI DAERAH
1.	2.	3.
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pasambahan Silek jo Randai c. KIM BOX (Kirim Input Mengolah Sampah pada Dropbox) d. SIFUAN GUPA (Sistem Informasi dan Pengaduan Masyarakat Guguk Panjang)
	c. Mandiangin Koto Selayan	<ul style="list-style-type: none"> a. Komunikasi dan Informasi Pelayanan Publik b. Kecamatan MKS Media Centre c. Pojok Baca Digital d. Whatsapp Centre e. (SAMPOLARI) Sistem Olah Sampah Sendiri
9.	Rumah Sakit Umum Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Aksi Lancar BB Naik b. Paket Tuntas Pasti di RSUD Kota Bukittinggi
10.	UPTD-UPTD	
	a. Puskesmas Guguk Panjang	<ul style="list-style-type: none"> a. PERIGI LAMA (Perawatan Kesehatan Gigi dan Mulut Bagi Pasien Isolasi Mandiri) b. POSTEKDA (Pos Pengukuran Tekanan Darah) c. PAPA ASIK (Pemberian Hadiah Pada Bayi Asi Eksklusif) d. BADONCEK (Bantuan Dana Oleh Perusahaan untuk Cek Kesehatan) e. PHP Debay (Pemberian Hadiah Psyandu bagi Kader, Balita, dan Bayi) f. DUTA FE g. KADES MANTAP (Kendali Diabetes Mellitus dengan Tepat) h. SENSASI (Sehat Tanpa Hipertensi) i. PMO ODGJ Online (Pengawas Menelan Obat Orang dengan Gangguan Jiwa Online) j. PMO TB Online (Pengawas Menelan Obat TBC Online) k. Sadar Kasihat (Imunisasi Dasar Lengkap untuk Generasi Sehat) l. Puskesmas Bakaba (Puskesmas Guguk Panjang Bakaba) m. PHBS Online (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat Online) n. Pos Rehat (Posyandu Remaja Sehat) o. Delia (Kader Peduli Diare) p. Daftadir Online (Daftar Tidak Hadir Puskesmas Guguk Panjang Online) q. Kupas Online (Kuesioner Kepuasan Pasien Online)
	b. Puskesmas Plus Mandiangin	a. PAPA ASIEK (Pencatatan Dan Pelaporan Berbasis Elektronik)
	c. Puskesmas Nilam Sari	a. ADEKKU MANTAP (Aplikasi Kepuasan Masyarakat dan Pasien)
	d. Puskesmas Rasimah Ahmad	a. KLINIK HERBING
	e. Instalasi Farmasi	a. Rekan Cantik

NO.	PERANGKAT DAERAH	INOVASI DAERAH
1.	2.	3.
	f. Labor	a. SILUKI HEBAT (Sistem Informasi Laboratorium untuk Bukittinggi Hebat)
11.	UPTD DIKBUD	
	1. TK Negeri 1 Bukittinggi	Pemanfaatan Lingkungan dalam Inovasi Pembelajaran di Sekolah Alam di TK Negeri 1 Bukittinggi
	2. TK NEGERI PEMBINA	Mengembangkan Literasi di TK Negeri Pembina Kota Bukittinggi
	3. TK Aisyiyah 1 Bukittinggi	Pembelajaran Berdiferensiasi Berbasis Proyek
	4. TK Islam Al-Azhar	Pengembangan Video Animasi Pembelajaran
	5. SDN 01 Benteng Pasa Atas	a. Peta Menuju Sekolah Liberat (Perpustakaan Digital) b. Pembedig Abad 21 di SDN 01 Benteng Pasar Atas
	6. SDN 01 Ladang Cakiah	Menimba De Poli (Meningkatkan Minat Baca Dengan Pohon Literasi)
	7. SDN 01 Campago Ipuh	a. Program Cemerlang (Cerdas Menghapal Alqur'an dan Mengulang b. Remember Box
	8. SDN 02 Percontohan	SIMENTAL (Sekolah Inovatif Menuju Digital)
	9. SDN 02 Aur Kuning	Colabs Visit SDN 02 Aur Kuning
	10. SDN 03 Pakan Kurai	a. Sekolah Inovasi "Guruku Nabi Muhammad SAW" (Menggugu dan Meniru Perilaku Nabi Muhammad SAW) b. Pembelajaran Blender (Blended Learning) c. QR Code Sampah d. Token (Toilet Kejujuran) dan Kebiasaan Hidup Bersih dan Sehat e. Baliak ke Ranah Minang
	11. SDN 03 Pakan Labuah	Buku Monitoring Keagamaan di SDN 03 Pakan Labuah
	12. SDN 03 Pulau Anak Air	Basaku Bacelengan (Baca Satu Buku, Bercerita Lengkapi Impian)
	13. SDN 04 Birugo	TECIL "TENTARA CILIK"
	14. SDN 04 Garegeh	Sayat Saja Dua Kali (Satu Ayat Sehari Saja Dunia Akhirat Berkah Berlimpah)
	15. SDN 04 Bukit Apit Puhun	Litaracy Is Fun, Effective And Effisient
	16. SDN 05 Birugo	Membudidayakan Tanaman Hias dengan Polybag di Sekolah
	17. SDN 05 Tarok Dipo	Kelas Digital
	18. SDN 06 Pulau Anak Air	Back To Traditional Game (Batoraga)
	19. SDN 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah	a. Bubung Angkasa (Buku Penghubung Antara Guru, Orang Tua, dan Siswa) b. Pembuatan Video Pembelajaran Menggunakan Aplikasi Active Presenter
	20. SDN 06 Parit Antang	Kembang Dasi pada SDN 06 Parit Antang
	21. SDN 07 Belakang Balok	a. Kecil Menanam Besar Memanen



NO.	PERANGKAT DAERAH	INOVASI DAERAH
1.	2.	3.
		b. Masyarakat Menanam c. Lingkungan Bebas Sampah Plastik dengan Ecorobick
	22. SDN 07 Kubu Gulai Bancah	Teras Literasi SDN 07 Kubu Gulai Bancah
	23. SDN 07 Teladan	Nan Taralah Go "Penyimpanan Data Administrasi Sekolah di Google Drive
	24. SDN 08 Kubu Tanjung	GAMAD (Ragam Tari Daerah)
	25. SDN 08 Tarok Dipo	Mari Kita Berbagi Dengan "Katidiang Berkah"
	26. SDN 09 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Literasi/Optimalisasi Mading Sekolah
	27. SDN 09 Belakang Balok	a. Pohon Besar Penyelamat b. SabuSaku (Satu Bulan Satu Buku) c. Samlampah (Sampah Menyelamatkan Sampah)
	28. SDN 09 Manggis Gantiang	Sekolah Bahagia
	29. SDN 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Museum SDN 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah
	30. SDN 10 Puhun Pintu Kabun	"Digital Class" Wahana Pengembangan Kemampuan Guru dan Siswa
	31. SDN 10 Sapiran	LITERASI
	32. SDN 11 Bukit Apit Puhun	Pankreas SDN 11 Bukit Api Nuhun
	33. SDN 11 Campago Guguk Bulek	SDN 11 (Cintailah Gemar Baca)
	34. SDN 11 Aur Kuning	Duta Literasi SDN 11 Aur Kuning
	35. SDN 12 Puhun Pintu Kabun	Permainan Ular Tangga Dalam Menghafal Perkalian
	36. SDN 12 Bukit Cangang	Satu Hari Satu Lagu (Sari Sagu)
	37. SDN 13 Kubu Gulai Bancah	Basipakak (Bank Sampah Inovatif, Peduli Alam, dan Berkarakter)
	38. SDN 13 Bukit Apit Nuhun	a. Penggunaan Metode Wahdah Dalam Meningkatkan Hafalan Juz 30 Peserta Didik b. POJA (Pojok Baca)
	39. SDN 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah	Pohon Ingatan
	40. SDN 14 Tanjung Alam	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Karakter di Sekolah (TASPEN KASEK)
	41. SDN 15 Pulau Anak Air	Pembuatan Alat Peraga Pembelajaran
	42. SDN 16 Cimpago Ipuh	"KUALI MERI" (Kualitas Literasi Membaca dan Bercerita)
	43. SDN 16 Tarok Dipo	a. Yel Yel 16 Bisa Sebel (Yel yel bisa 16 sebelum belajar) b. Gesis 16 Bisa Sebud (Gerakan Siswa 16 Bisa Seni dan Budaya) c. Gogo Jurcil (Ayo Bergerak Jurnalis Cilik)
	44. SDN 17 Pakan Kurai	Optimalisasi Penggunaan Media LCD Proyektor dalam Proses Pembelajaran
	45. SDN 17 Manggis Ganting	Tic Tac Toe Perkalian (Educationa Game)



NO.	PERANGKAT DAERAH	INOVASI DAERAH
1.	2.	3.
	46. SDN 18 Tarok Dipo	a. Peningkatan Karakter Peserta Didik melalui Penggunaan Buku Jujur dan Kotak Jujur di SDN 18 Tarok Dipo b. Traffic Light Card SDN 18 Tarok Dipo
	47. SDN 19 ATTS	Literasi/Optimalisasi Mading Sekolah
	48. SMPN 1 Bukittinggi	a. Pengembangan Literasi Berbasis Produk b. Peningkatan Nilai Spiritual Siswa melalui Shalat Berjamaah di 23 Mushalla
	49. SMPN 2 Bukittinggi	Greenhouse dan Pengolahan Sampah Sekolah sebagai Sumber Belajar
	50. SMPN 3 Bukittinggi	Gerakan Literasi Digital Sekolah
	51. SMPN 5 Bukittinggi	a. Gerakan Wisata Literasi Spenli Bukittinggi b. Gerakan Literasi Spenli Bukittinggi
	52. SMPN 6 Bukittinggi	Gerakan Literasi Meningkatkan Minat Baca Siswa
	53. SMPN 7 Bukittinggi	Satu Surat Satu Minggu (SASUSAMI) Literasi Tahfiz Qur'an
	54. SMP 8 Bukittinggi	Semarak Tahsin dan Tahfiz Qur'an
	55. SPNF SKB Kota Bukittinggi	Memajukan Pendidikan Non Formal dengan Berbasis Tas Map
12.	BUMD	
	a. BPRS Jam Gadang	a. Tabungan Utsman b. Aplikasi Absensi Berbasis Web
	b. PDAM Tirta Jam Gadang	a. Pompa Pintar b. P3 (Peningkatan Pelayanan Pelanggan)

